

**PENGARUH PENCEGAHAN FRAUD TERHADAP GOOD GOVERNANCE
(Studi Kasus pada Itwasda Polda Metro Jaya)**

**THE INFLUENCE OF FRAUD PREVENTION IN ENHANCING GOOD GOVERNANCE
(Case Study at Itwasda Polda Metro Jaya)**

Eddy Sarwono

Universitas Padjadjaran

eddysarwono@yahoo.com

Abstract. *The Police of the Republic of Indonesia as the public institution that performs functions of government are required to support and implement good governance. However, there are still many complaints of people who are not satisfied with the Police's performance which is widely covered by the media and became the public spotlight. This is an indication that the Police institution has not been able to realize good governance. Besides, there are various acts of violation and abuse of authority (fraud) in various duties of the Police. This research objective is to deepened the influence of fraud prevention which consists of identification of symptom & redflag, opportunity identification, assessment symptom, red flags and opportunity, reporting and monitoring on good governance at Polda Metro Jaya. The the questionnaires were filled by all members of Regional Supervision Inspectorate (Itwasda) in Polda Metro Jaya. In-depth interview with Irwasda Polda Metro Jaya was conducted to obtain further explanation. The results show that in Polda Metro Jaya there are good fraud prevention, good governance, and the influence of fraud prevention which is consisting of identification of symptom and redflags of opportunity identification, assessment symptom, red flags and opportunity, reporting and monitoring simultaneously affect good governance in the amount of 49.5%. It is suggested that Police has to improve the personnel competency in Itwasda, to implement integrated remuneration system, and to optimize the supervision and audit through any incurred symptoms as the fraud prevention.*

Keywords : fraud prevention, good governance, Regional Police (Polda)

Abstrak. *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dituntut untuk mendukung serta melaksanakan good governance. Namun masih banyaknya keluhan masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja Polri yang banyak diliput oleh media dan menjadi sorotan masyarakat luas merupakan indikasi bahwa lembaga Polri belum dapat mewujudkan good governance. Selain itu adanya berbagai tindakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang (fraud) dalam banyak pelaksanaan tugas Polri. Penelitian ini memperdalam pengaruh pencegahan fraud yang terdiri dari identifikasi symptom & redflag, identifikasi peluang, assessment symptom, red flags dan peluang, pelaporan dan monitoring terhadap good governance di Polda Metro Jaya. Penelitian dilakukan dengan pengisian angket oleh seluruh anggota Inspektorat Pengawasan dan Daerah (Itwasda) di Polda Metro Jaya. Wawancara mendalam dengan Irwasda Polda Metro Jaya dilaksanakan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa di Polda Metro Jaya pencegahan fraud secara umum sudah baik, good governance sudah baik, dan pencegahan fraud yang terdiri dari yang terdiri dari identifikasi symptom and redflags identifikasi peluang, assessment symptom, red flags dan peluang, pelaporan serta monitoring secara bersama-sama mempengaruhi good governance adalah sebesar 49,5%. Saran yang diberikan adalah perlu adanya upaya peningkatan kompetensi bagi personil Itwasda, penyelenggaraan sistem remunerasi yang terintegrasi, dan optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan melalui munculnya gejala-gejala (symptoms) sebagai pencegahan fraud.*

Kata kunci: pencegahan fraud, good governance, Polda

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak adanya krisis finansial di berbagai negara di tahun 1997-1998 yang diawali krisis di Thailand (1997), Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia dipandang sebagai akibat lemahnya praktik *Good Governance* di negara-negara Asia. Ini disebabkan adanya kondisi-kondisi obyektif yang relatif sama di negara-negara tersebut antara lain adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku bisnis, konglomerasi dan monopoli, proteksi, dan intervensi pasar sehingga membuat negara-negara tersebut tidak siap memasuki era globalisasi dan pasar bebas (Tjager dkk., 2003).

Bappenas mencatat 14 (empat belas) unsur penting *Good Governance* dalam membangun Pemerintahan Yang Baik (*Good Public Governance*), diantaranya (1) wawasan ke depan (*visionary*); (2) keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*); (3) partisipasi masyarakat (*community participation*); (4) tanggung gugat (*accountability*); (5) supremasi hukum (*rule of law*); (6) demokrasi (*democracy*); (7) profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*); (8) daya tanggap (*responsiveness*); (9) keefisienan dan keefektifan (*efficiency and effectiveness*); (10) desentralisasi (*decentralization*); (11) kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat (*private and civil society partnership*); (12) komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*); (13) komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*); dan (14) komitmen fair (*commitment to fair market*).

Dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan seluruh instansi pemerintahan, termasuk Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dituntut untuk mendukung serta melaksanakan *Good Governance*.

Masih banyaknya keluhan masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja Polri merupakan indikasi bahwa lembaga Polri belum dapat mewujudkan *Good Governance*. Dimana hal tersebut dapat ditandai beberapa indikator, seperti masih buruknya kualitas pelayanan publik (lambat, tidak ada kepastian, berbelit-belit, arogan, budaya minta dilayani atau gaya feodal), selain itu bentuk pelayanan Polri dinilai sarat dengan perilaku KKN, rendahnya kualitas disiplin dan etos kerja personel, kualitas manajemen yang tidak produktif, efektif dan efisien serta kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan sehingga hal tersebut menunjukkan kinerja Polri yang kurang profesional dalam menjalankan tugas pokoknya¹.

Selain itu berkaitan dengan kinerja Polri masih diwarnai dengan adanya berbagai tindakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang (*fraud*) dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan data Div Propam Polri bahwa pada tahun 2011 terdapat 9.681 pelanggaran disiplin dan 763 pelanggaran pidana dengan prosentase kenaikan 2,4 % tiap tahunnya.² Bentuk penyimpangan polisi pada reformasi ini terlihat dari beberapa kasus yang telah banyak diliput oleh media dan menjadi sorotan masyarakat luas. Di antaranya adalah keterlibatan aparat polisi dalam berbagai kasus korupsi, kasus mafia pajak dan hukum, kasus *illegal logging*, kasus kekerasan atau terlibat dalam kasus kriminal lainnya.

Munculnya berbagai kasus yang muncul ke publik, merupakan salah satu indikasi terjadinya *fraud* dalam instansi kepolisian sehingga diperlukan upaya untuk pencegahan *fraud* dengan demikian *good governance* Polri dapat menjadi baik.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

¹ Analisa spectrum kinerja kepolisian, analisa tahunan imparisal, 2012

² Laporan akhir tahun Divisi Profesi dan Pengamanan Polri 2011.

1. Bagaimana gambaran pencegahan *fraud* di Polda Metro Jaya
2. Bagaimana gambaran *Good Governance* di Polda Metro Jaya
3. Seberapa besar pengaruh pencegahan *fraud* yang terdiri dari identifikasi *symptom & redflag*, identifikasi peluang, *assessment symptom, red flags* dan peluang, pelaporan dan *monitoring* terhadap *Good Governance* di Polda Metro Jaya

Maksud Penelitian

Memperoleh bukti empiris mengenai pencegahan *fraud* yang terdiri dari identifikasi *symptom & redflag*, identifikasi peluang, *assessment symptom, red flags* dan peluang, pelaporan dan *monitoring* terhadap *good governance* di Polda Metro Jaya.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil kajian dan temuan mengenai:

1. Gambaran pencegahan *fraud* di Polda Metro Jaya
2. Gambaran *Good Governance* di Polda Metro Jaya
3. Pengaruh pencegahan *fraud* yang terdiri dari *identifikasi symptom & redflag*, identifikasi peluang, *assessment symptom, red flags* dan peluang, pelaporan dan *monitoring* terhadap *good governance* di Polda Metro Jaya

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Aspek Teoritis
Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu akuntansi. Khususnya yang berkenaan dengan pengaruh pencegahan *fraud* terhadap *Good Governance*.
2. Aspek Praktis
Hasil penelitian ini dapat berguna bagi Polda Metro Jaya untuk pertimbangan kebijaksanaan yang menyangkut pencegahan *fraud* dan pengaruhnya terhadap *Good Governance*.

B. KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi dan peraturan yang terkait telah meningkatkan tuntutan dan peran para pimpinan instansi, yang saat ini harus memandang *fraud* dan penyalahgunaan wewenang sebagai ancaman yang lebih besar. Mereka harus mampu mengarahkan penanganan permasalahan *fraud* secara lebih rinci dan dapat dioperasionalkan oleh pelaksana di lapangan.

Fraud diterjemahkan dengan *kecurangan* sesuai Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, demikian pula *error* dan *irregularities* masing-masing diterjemahkan sebagai *kekeliruan* dan *ketidakberesan* sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No. 32. Menurut standar pengauditan, faktor yang membedakan kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang sengaja atau tidak disengaja (IAI, 2001). Terjadinya kecurangan - suatu tindakan yang disengaja - yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan.

Fraud adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh, baik dengan tindakan atau penghapusan, yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan (bias). *Fraud* yang terjadi di suatu entitas memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan auditor independen (Arief, 2008).

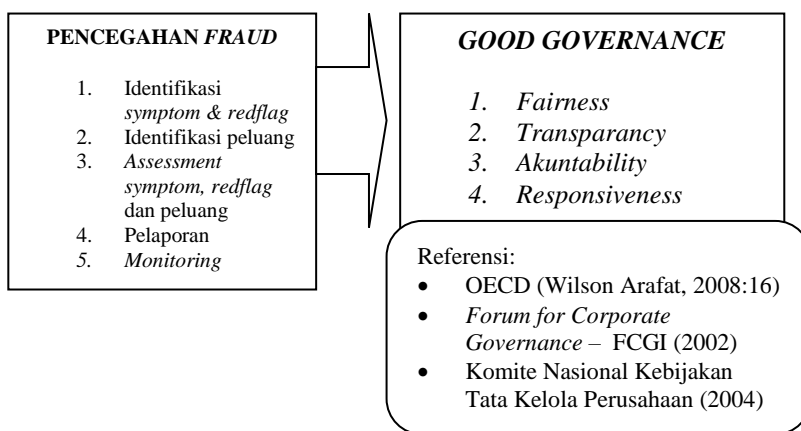
Indikasi terjadinya *fraud* dapat dilihat melalui beberapa indikator, diantaranya menurut dimensi yang digunakan oleh Tommie and Aaron (2010) melalui aspek identifikasi *symptom and redflags*, identifikasi peluang, *assessment symptom, red flags* dan peluang, pelaporan serta I. Akibat adanya perilaku manajemen yang tidak transparan dalam penyajian informasi ini (*fraud*) akan

menjadi penghalang adanya praktik *Good Governance* karena salah satu prinsip dasar dari *Good Governance* adalah *Transparency* (keterbukaan).

Esensi *Good Governance* adalah peningkatan kinerja organisasi melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Gunarsih, 2003). Menurut Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (2004), prinsip-prinsip *good governance* terbagi ke dalam lima bagian adalah sebagai berikut (1) Keterbukaan (*Transparency*), (2) Akuntabilitas (*Accountability*), (3) Tanggung Jawab (*Responsibility*), (4) Independensi (*Independency*) dan (5) Kewajaran (*Fairness*)

Dalam rangka menegakkan prinsip *Good Governance* di Polda Metro Jaya, khususnya prinsip *fairness*, *transparency*, akuntabilitas dan *responsiveness*, penyajian informasi akuntansi yang berkualitas dan lengkap dalam laporan tahunan sangat diperlukan. Hal ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, disusun paradigma penelitian disajikan dalam gambar berikut:



Paradigma Penelitian

a. Gambaran Pencegahan *Fraud*

Istilah *fraud* pada umumnya dipakai untuk menjelaskan tindakan-tindakan seperti penipuan, suap, pemalsuan, pemaksaan, korupsi, pencurian, persekongkolan, penggelapan, penyalahgunaan, menyembunyikan fakta, dan kolusi. Demi mudahnya *fraud* dapat didefinisikan sebagai penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, menghindarkan diri dari kewajiban, atau merugikan pihak lain.

Fraud diterjemahkan dengan *kecurangan* sesuai Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, demikian pula *error* dan *irregularities* masing-masing diterjemahkan sebagai *kekeliruan* dan *ketidakberesan* sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No. 32. Menurut standar pengauditan, faktor yang membedakan kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang sengaja atau tidak disengaja (IAI, 2001). Terjadinya kecurangan - suatu tindakan yang disengaja - yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan.

Association of Certified Fraud Examiners ("ACFE") di Amerika Serikat menyusun peta mengenai *fraud*. Peta ini berbentuk pohon, dengan cabang dan ranting. Tiga cabang utama dari *fraud tree* ini adalah 1) *Corruption*, 2) *Asset misappropriation* dan 3) *fraudulent statement*.

Fraud (Kecurangan) yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, perlu diketahui gejala yang menunjukkan adanya kecurangan tersebut, adapun gejala tersebut adalah:

A. Gejala kecurangan pada manajemen

- Ketidakcocokan di antara manajemen puncak;
- Moral dan motivasi karyawan rendah;
- Departemen akuntansi kekurangan staf;
- Tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi/perusahaan dari pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas;
- Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi;
- Penjualan/laba menurun sementara itu utang dan piutang dagang meningkat;
- Perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama;
- Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan;
- Terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku.

B. Gejala kecurangan pada karyawan/pegawai

- Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian/penjelasan pendukung;
- Pengeluaran tanpa dokumen pendukung;
- Pencatatan yang salah/tidak akurat pada buku jurnal/besar;
- Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran;
- Kekurangan barang yang diterima;
- Kemahalan harga barang yang dibeli;
- Faktur ganda;
- Penggantian mutu barang.
- Independen (Arief, 2008).

Indikasi terjadinya *fraud* dapat dilihat melalui beberapa indikator, diantaranya menurut dimensi yang digunakan oleh Tommie and Aaron (2010) melalui aspek identifikasi *symptom and redflags*, identifikasi peluang, *assessment symptom, red flags* dan peluang, pelaporan serta *monitoring*. Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

H₁ : Pencegahan *fraud* di Polda Metro Jaya tinggi

b. Gambaran *Good Governance*

Tata kelola yang baik (*good governance*) adalah suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, rapat umum pemegang saham dan para pemegang kepentingan (*stakeholder*) lainnya, dan merupakan suatu sistem mengukur keseimbangan (*check and balance*) mencakup pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan sehingga dibutuhkan proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Dua teori utama yang terkait dengan *governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Sedangkan *agency theory* memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai *agents* bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship model*.

Agency theory mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *governance* berkembang dan bertumpu pada *agency theory* dimana pengelolaan entitas harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sistem *governance* yang baik (*Good Governance*) memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

Forum for Corporate Governance Indonesia – FCGI (2002) menjabarkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana yang diuraikan OECD, sebagai berikut :

1. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini diwujudkan dengan membuat peraturan entitas yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi entitas terhadap perbuatan buruk orang dalam, kesepakatan sendiri (*self-dealing*), dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite termasuk sistem remunerasi; menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan penuh material apapun; mengungkapkan peluang kerja yang sama (*equal job opportunity*).

2. *Disclosure* dan Transparansi (*Transparency*)

Prinsip ini diwujudkan dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practice* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas; mengembangkan *information technology* (IT) dan *management information system* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh manajemen yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan kosong serta terbuka.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini diwujudkan dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi audit internal sebagai mitra strategik berdasarkan *best practices*. Transformasi menjadi *risk based audit*; menjaga manajemen kontak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan; penegakan hukum; menggunakan auditor eksternal yang memenuhi syarat.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang menyadari akan adanya tanggung jawab sosial; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

H₂ : Good Governance Polda Metro Jaya baik

c. Pengaruh Pencegahan *Fraud* terhadap *Good Governance*

Tindak kecurangan saat ini terus terjadi baik di instansi pemerintah maupun swasta. Kecurangan atau yang sering disebut *fraud* dilakukan dengan beragam modus dan semakin berkembang seiring perkembangan zaman. Data Komite Pemberantasan Korupsi tahun 2011 menyatakan penyelamatan potensi keuangan negara akibat pengalihan hak barang milik negara (BMN) sebesar Rp532,20 miliar. Ini merupakan nilai yang cukup tinggi yang jika tidak dicegah akan merugikan banyak pihak.

ACFE mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga kelompok besar yaitu (1) penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), contohnya pencurian inventaris, persediaan, uang kas, pemalsuan faktur/bukti pengeluaran, pengeluaran ganda, kecurangan dalam piutang dan gaji; (2) pelaporan yang menyesatkan (*fraudulent statements*) dengan tujuan agar mendapatkan laba tidak wajar, melalui pendapatan fiktif/dicatat lebih tinggi, menyembunyikan utang dan biaya, penilaian aset tidak wajar, dan biaya kurang dicatat; dan (3) korupsi, seperti konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan. Akibat adanya perilaku manajemen yang tidak transparan dalam penyajian informasi ini (*fraud*) akan menjadi penghalang adanya praktik *good governance* pada entitas karena salah satu prinsip dasar dari *good governance* adalah *transparency* (keterbukaan). Esensi tata kelola adalah peningkatan kinerja entitas melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Gunarsih, 2003). Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

H₃ : Terdapat pengaruh Pencegahan *Fraud* terhadap *Good Governance* di Polda Metro Jaya

C. METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2006:72). Menurut Sugiyono (2008:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Arikunto (1998:120) jika jumlah populasi obyek penelitian kurang dari 100 maka diambil semua, tetapi jika lebih dari 100, maka dapat diambil 10% sampai dengan 15% dari populasi yang ada. Sampel penelitian ini adalah seluruh anggota populasi di Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) di Polda Metro Jaya yang berjumlah 15 orang. Adapun populasi dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Irwasda	1 orang
2.	Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subagrenmin)	4 orang
3.	Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Subagdumasan)	3 orang
4.	Inspektorat Bidang Operasional (Itbidops);	3 orang
5.	Inspektorat Bidang Pembinaan (Itbidbin)	4 orang
	Jumlah	15 orang

Sumber : Polda Metro Jaya, 2012

Pada penelitian ini, digunakan dua jenis analisis (1) analisis deskriptif khususnya bagi variabel yang bersifat kualitatif dan (2) analisis kuantitatif berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat faktor penyebab sedangkan analisis kuantitatif menitikberatkan dalam pengungkapan perilaku variabel penelitian. Dengan menggunakan kombinasi metode analisis tersebut dapat diperoleh generalisasi yang bersifat komperhensif. Metode analisis tersebut dapat diperoleh generalisasi yang bersifat komperhensif

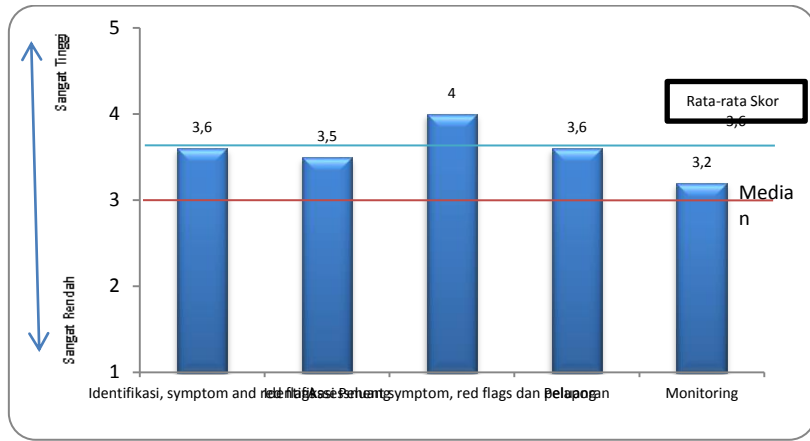
Dalam penelitian sumber data primer diperoleh dari melalui angket yang berisi pertanyaan/kuesioner mengenai variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik wawancara dengan Irwasda Polda Metro Jaya dan studi kepustakaan baik melalui sumber bacaan yang menunjang terhadap variabel yang diteliti.

D. HASIL DAN KESIMPULAN

a. Hasil Penelitian

Gambaran Pencegahan *Fraud* di Polda Metro Jaya

Dari hasil pendapat responden, dapat dibuat pengelompokan data dalam bentuk rata-rata skor untuk menentukan nilai kecenderungan dari pendapat responden terhadap variabel pencegahan *fraud*, dapat dilihat dalam Gambar 2 di bawah ini:



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2012

Gambar 2
Gambaran Pencegahan Fraud

Hasil penelitian yang disajikan dalam Gambar 2 menunjukkan pencegahan *fraud* di Polda Metro Jaya. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* di Polda Metro Jaya secara umum sudah baik (berada di atas median) dengan rata-rata skor 3,6 , artinya bahwa kelima sub variabel dari upaya pencegahan *fraud* yang meliputi dimensi identifikasi *symptom and redflags*, identifikasi peluang, *assessment symptom, red flags* dan peluang, pelaporan serta monitoring dilaksanakan dengan baik. Namun demikian terdapat dua dimensi yang nilainya berada di bawah median dan di bawah rata-rata skor yaitu dimensi identifikasi peluang (3,5) dan monitoring (3,2).

Gambaran Good Governance Polda Metro Jaya

Variabel *Good Governance* dalam penelitian ini diukur melalui empat dimensi yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsiveness*. Dari hasil pendapat responden dibuat pengelompokkan data dalam bentuk rata-rata skor untuk menentukan nilai kecenderungan dari pendapat responden terhadap variabel penerapan *Good Governance*, dapat dilihat pada Gambar 3.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2012

Gambar 3
Gambaran Good Governance Polda Metro Jaya

Gambar 3 menunjukkan *Good Governance* di Polda Metro Jaya dilihat dari dimensi *fairness, transparency, akuntabilty dan responsiveness* secara umum sudah baik (berada di atas median) dengan nilai rata-rata skor 3,9. Namun masih terdapat 1 indikator yang nilainya jauh di bawah rata-rata yaitu dimensi *fairness* (3,6).

Pengaruh Pencegahan *Fraud* terhadap *Good Governance* Polda Metro Jaya

Dapat diketahui bahwa pencegahan *fraud*, yang terdiri dari identifikasi *symptom and redflags* ($X_{1.1}$), identifikasi peluang ($X_{1.2}$), *assessment symptom, red flags* dan peluang ($X_{1.3}$), pelaporan ($X_{1.4}$) serta *monitoring* ($X_{1.5}$) berpengaruh terhadap *Good Governance* (Y). Besarnya koefisien pengaruh baik langsung maupun tidak langsung serta pengaruh total upaya pencegahan *fraud* terhadap *Good Governance* disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Koefisien Pengaruh Pencegahan *Fraud* Terhadap *Good Governance* (Y)

Dimensi	Pengaruh						Pengaruh Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui $X_{1.1}$	Tidak Langsung Melalui $X_{1.2}$	Tidak Langsung Melalui $X_{1.3}$	Tidak Langsung Melalui $X_{1.4}$	Tidak Langsung Melalui $X_{1.5}$	
$X_{1.1}$	0.009	-	0.011	0.008	0.008	0.012	0.048
$X_{1.2}$	0.031	0.011	-	0.023	0.021	0.030	0.116
$X_{1.3}$	0.022	0.008	0.23	-	0.018	0.024	0.095
$X_{1.4}$	0.023	0.008	0.021	0.018	-	0.024	0.094
$X_{1.5}$	0.052	0.012	0.030	0.024	0.024	-	0.142
Pengaruh Total							0.495

Keterangan:

$X_{1.1}$ Identifikasi *Symptom And Redflags*

$X_{1.2}$ Identifikasi Peluang

$X_{1.3}$ *Assessment Symptom, Red Flags Dan Peluang*

$X_{1.4}$ Pelaporan

$X_{1.5}$ *Monitoring*

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2012

Artinya bahwa upaya pencegahan *fraud* yang terdiri dari Identifikasi *Symptom And Redflags* (X1), Identifikasi Peluang (X2), *Assessment Symptom, Red Flags Dan Peluang* (X3), Pelaporan (X4), serta *Monitoring* (X5) secara bersama-sama mempengaruhi *Good Governance* adalah sebesar 0,495 dan sisanya sebesar $(0,711)^2 = 0,505$ atau 50,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk ke dalam penelitian. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa di luar variabel penelitian yaitu upaya pencegahan *fraud* ternyata masih banyak variabel lain yang pengaruhnya cukup besar dalam *Good Governance*.

Berdasarkan hasil analisis data, maka diperoleh kesimpulan bahwa upaya pencegahan *fraud* berpengaruh terhadap *Good Governance* dalam kategori cukup kuat (49,5%), Adapun pengaruh lainnya adalah sebesar 50,5%. Pengaruh total terbesar diperoleh dari dimensi *monitoring* sebesar 14,2% dan pengaruh total terkecil diperoleh dari dimensi Identifikasi *Symptom And Redflags* sebesar 4,8%.

Pengujian hipotesis upaya pencegahan *fraud* berpengaruh terhadap *Good Governance* dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} perhitungan uji signifikansi dengan menggunakan alpha 0,05 pada uji satu pihak dengan derajat kebebasan (dk) n-2 maka dk=13 diperoleh F_{hitung} dan t_{tabel} dengan taraf kesalahan 5%. Berdasarkan ketentuan hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka diketahui bahwa harga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($38,502 > 2,86$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pencegahan *fraud* dan *Good Governance* memiliki pengaruh yang signifikan.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hetifah (2003:87) menyatakan bahwa *good governance* dipengaruhi oleh banyak faktor. Terdapat 5 upaya yang akan dikemukakan untuk menggambarkan sejauhmana perubahan menuju *good governance*, antara lain : 1) perampingan

organisasi dalam pemerintahan menuju birokrasi, 2) pemberian insentif terhadap prestasi, 3) pemberantasan *fraud*, 4) peningkatan kualitas pelayanan publik, dan 5) mendorong partisipasi.

b. Simpulan

- Pencegahan *fraud* di Polda Metro Jaya secara umum sudah baik (berada di atas median) dengan rata-rata skor 3,6; artinya bahwa kelima sub variabel dari pencegahan *fraud* yang meliputi dimensi identifikasi *symptom and redflags*, identifikasi peluang, *assessment symptom, red flags* dan peluang, pelaporan serta *monitoring* dilaksanakan dengan baik. Namun demikian terdapat dua dimensi yang nilainya berada di bawah rata-rata skor yaitu dimensi identifikasi peluang (3,5) dan *monitoring* (3,2).
- *Good governance* di Polda Metro Jaya dilihat dari dimensi *fairness, transparency*, akuntabilitas dan *responsiveness* secara umum sudah baik (berada di atas median) dengan nilai rata-rata skor 3,9. Namun masih terdapat 1 indikator yang nilainya jauh di bawah rata-rata yaitu dimensi *fairness* (3,6).
- Pencegahan *fraud* yang terdiri dari yang terdiri dari Identifikasi *Symptom And Redflags* ($X_{1.1}$), Identifikasi Peluang ($X_{1.2}$), *Assessment Symptom, Red Flags* Dan Peluang ($X_{1.3}$), Pelaporan ($X_{1.4}$) Serta *Monitoring* ($X_{1.5}$) secara bersama-sama mempengaruhi *Good Governance* adalah sebesar 0,495 dan sisanya sebesar $(0,711)^2 = 0,505$ atau 50,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak masuk ke dalam penelitian

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan saran dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan *pencegahan fraud* dan *Good Governance* diantaranya adalah:

1. Dimensi identifikasi peluang dinilai paling rendah dalam *pencegahan fraud*. Dalam dimensi identifikasi peluang terdapat tiga aspek yakni aspek operasi organisasi tidak efisien, aturan dan kebijakan tidak dipatuhi, aset organisasi tidak terlindungi dan pelaporan keuangan tidak dapat diandalkan. Aspek ini harus menjadi bahan perbaikan di Polda Metro Jaya dalam mengefektif dan mengefisienkan struktur organisasinya dengan, meningkatkan upaya pencatatan, penomoran, pendistribusian aset dan perlindungan aset organisasi. Dalam hal pelaporan keuangan yang sampai saat ini masih dinilai wajar tanpa pengecualian maka perlu adanya upaya peningkatan kompetensi bagi personil Itwasda yang meliputi Irwasda, Subagrenmin, Subagdumasan, Itbidops dan Itbidin di Polda Metro Jaya melalui pendidikan, seminar, atau kegiatan lainnya yang mendukung pemahaman dan keahlian mengenai akuntansi keuangan.
2. Dimensi *fainess* dinilai paling rendah dalam *Good Governance* di Polda Metro Jaya. Aspek dalam dimensi *fairness* atau kewajaran yang dinilai rendah adalah organisasi telah memenuhi kesesuaian gaji/tunjangan dengan kinerja yang diberikan. Ini menjadi catatan bagi Polda Metro Jaya untuk menyelenggarakan sistem penggajian yang terintegrasi dengan remunerasi yang berlaku di lingkungan Polda Metro Jaya dengan memanfaatkan aplikasi SMK (sistem manajemen kinerja) guna menjamin aspek *fairness*, transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian gaji Polri
3. Aspek *identifikasi symptom and redflags* memberikan kontribusi yang paling kecil dalam *pencegahan fraud* yakni sebesar 4,8%. Karena besar bukti-bukti *fraud* merupakan bukti-bukti sifatnya tidak langsung, maka optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dioptimalkan melalui munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pengguna laporan keuangan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja/perwira polisi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- ACFE, 2000, *Fraud Examiners Manual*, Third Edition.
- Achmad, Daniri, 2006, *Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance, Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta, Ray Indonesia.
- Albrecht, W.S., 2003, *Fraud Examination*, Southwestern, Thompson.
- Aldridge, John.E dan Siswanto Sutojo, 2008. *Good Corporate Governance*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta.
- Arafat, Wilson, 2008, *How To Implement Good Corporate Governance Effectively*, Jakarta, Skyrocketing Publisher.
- Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO), 1999, *Internal Control Integrated Framework*, AICPA Publication, USA.
- Malhotra, Naresh K., 2005, *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Polri, 2011, *Laporan akhir tahun Divisi Profesi dan Pengamanan Polri 2011*.
- Polri, 2012, *Analisa spektrum kinerja kepolisian, analisa tahunan imparisal*.
- Simanjuntak, R., 2008, *Kecurangan: Pengertian dan Pencegahan*, www.asei.co.id/internal/docs/Asei-Kecurangan.doc, 14 Oktober 2008.
- Spendolini, Michael J., 1992, *The Benchmarking Book*, Amacom, New York.
- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Suprayitno G., Khomsiyah, GI, dan Sedarnawati Y., 2004, *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance*, The Indonesian Institute for Corporate Governance.
- Tjager, I.N., Alijoyo, A., Djemat, H.R., dan Soembodo, B., 2009, *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Prehalindo, Jakarta.
- Tommie W., Singelton, Aaron J, G. Jack Bologna, dan Robert J. Lindquist, 2010, *Fraud Auditing & Forensic Auditing*, Willey & Sons, Inc.
- Tuanakota, Theodorus M., 2006, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Jakarta, FEUI.